

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Ngoro merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Ngoro yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Ngoro adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Ngoro yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Ngoro.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4 )
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2022.
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1 )
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
  26. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;

27. Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Ngoro sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Ngoro ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngoro. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan

Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

#### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

### BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan

Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan

awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

## 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

#### 3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

## **TAHUN LALU**

### **2.1      Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah." Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Ngoro pada tahun 2020 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2020 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.  
Realisasi belanja pada Kecamatan Ngoro Tahun 2020

| NO | URAIAN                                                              | ANGGARAN       | REALISASI     | %     |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|
| 1  | Belanja Bahan Pakai Habis                                           | 42.155.500,00  | 41.080.500,00 | 97,2% |
|    | - Belanja Alat Tulis Kantor                                         | 23.887.000,00  | 23.887.000,00 |       |
|    | - Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan                      | 6.366.500,00   | 6.366.500,00  |       |
|    | - Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) | 5.087.000,00   | 5.087.000,00  |       |
|    | Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                    | 6.815.000,00   | 5.740.000,00  | 84,4% |
| 2  | Belanja Bahan/Material                                              | 11.425.000,00  | 11.425.000,00 |       |
|    | - Belanja Bahan / Bibit Tanaman                                     | 2.625.000,00   | 2.625.000,00  |       |
|    | - Belanja Bahan untuk Peserta Pelatihan                             | 8.800.000,00   | 8.800.000,00  |       |
| 3  | Belanja Jasa Kantor                                                 | 108.858.960,00 | 97.821.367,00 | 89,6% |
|    | - Belanja Telepon                                                   | 3.600.000,00   | 559.017,00    | 15,5% |
|    | - Belanja Air                                                       | 0,00           | 0,00          |       |
|    | - Belanja Listrik                                                   | 30.400.000,00  | 22.653.390,00 | 74,4% |
|    | - Belanja Jasa Harian Kegiatan                                      | 9.150.000,00   | 9.150.000,00  |       |
|    | - Belanja Jasa Publikasi/ Dokumentasi                               | 3.750.000,00   | 3.750.000,00  |       |
|    | - Belanja Transport Peserta Kegiatan Non PNS                        | 8.800.000,00   | 8.800.000,00  |       |
|    | - Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur                    | 22.950.000,00  | 22.700.000,00 | 95,4% |
|    | Belanja Jasa Uji Laboratorium                                       | 3.400.000,00   | 3.400.000,00  |       |
|    | - Belanja Jasa Tenaga Administrasi Umum                             | 26.808.960,00  | 26.808.960,00 |       |
| 4  | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor                                | 35.475.000,00  | 33.773.500,00 | 95,3% |
|    | - Belanja Jasa Service                                              | 4.800.000,00   | 4.800.000,00  |       |
|    | - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas                        | 27.675.000,00  | 27.666.000,00 | 99,8% |
|    | - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan                               | 3.000.000,00   | 1.307.500,00  | 43,9% |
| 5  | Belanja Cetak dan Penggandaan                                       | 23.046.250,00  | 22.766.500,00 | 98,5% |
|    | - Belanja Cetak                                                     | 13.550.000,00  | 13.275.000,00 | 98,5% |
|    | - Belanja Penggandaan                                               | 9.496.250,00   | 9.491.500,00  | 99,4% |
| 6  | Belanja Makanan dan Minuman                                         | 81.470.000,00  | 81.470.000,00 |       |
|    | - Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                 | 55.540.000,00  | 55.540.000,00 |       |
|    | - Belanja Makanan dan Minuman Tamu                                  | 1.080.000,00   | 1.080.000,00  |       |
|    | - Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan                             | 24.850.000,00  | 24.850.000,00 |       |
| 7  | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu                       | 34.625.000,00  | 34.129.000,00 | 99,8% |
|    | Belanja Pakaian Panitia/Peserta Kegiatan                            | 34.625.000,00  | 34.129.000,00 | 99,8% |
| 8  | Belanja Perjalanan Dinas                                            | 86.700.000,00  | 85.593.250,00 | 99,3% |
|    | - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah                             | 79.800.000,00  | 79.800.000,00 |       |
|    | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah                                | 6.900.000,00   | 5.793.250,00  | 85,5% |
| 9  | Belanja Pemeliharaan                                                | 34.602.000,00  | 34.483.000,00 | 99,8% |
|    | - Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan                          | 24.127.000,00  | 24.073.000,00 | 99,8% |
|    | - Belanja pemeliharaan perlengkapan                                 |                |               |       |

|    |                                                                              |                  |                  |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|
|    | - Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa                           | 1.400.000,00     | 1.400.000,00     |   |
| 11 | Belanja Honorarium Non PNS                                                   | 10.200.000,00    | 10.200.000,00    |   |
|    | - Belanja Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan                          | 10.200.000,00    | 10.200.000,00    |   |
| 12 | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga               | 32.800.000,00    | 32.000.000,00    | 9 |
|    | Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat                            | 32.800.000,00    | 32.000.000,00    | 9 |
| 13 | Belanja Gaji dan Tunjangan                                                   | 2.009.549.000,00 | 1.648.934.588,00 | 8 |
|    | - Gaji Pokok Pokok PNS/Uang Representasi                                     | 1.613.224.000,00 | 1.338.643.600,00 |   |
|    | - Tunjangan Keluarga                                                         | 167.349.000,00   | 133.174.050,00   |   |
|    | - Tunjangan Jabatan                                                          | 70.254.000,00    | 60.200.000,00    |   |
|    | - Tunjangan Fungsional Umum                                                  | 56.315.000,00    | 46.880.000,00    |   |
|    | - Tunjangan Beras                                                            | 99.444.000,00    | 69.450.780,00    |   |
|    | - Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus                                            | 2.692.000,00     | 570.308,00       |   |
|    | - Pembulatan Gaji                                                            | 271.000,00       | 15.850,00        |   |
| 14 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS                                             | 769.720.000,00   | 600.025.510,00   |   |
|    | - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pertimbangan Obyektif Lainnya | 187.120.000,00   | 140.504.000,00   |   |
|    | - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja                               | 582.600.000,00   | 459.521.510,00   |   |
|    | TOTAL                                                                        | 3.335.826.710,00 | 2.788.152.215,00 | 8 |

Sumber Data Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel (T-C.29) sebagai berikut :

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**

**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**

**Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngoro

| Kode    | Urusan/ Bidang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah dan<br>Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program<br>(outcomes) / Kegiatan<br>(Output) | Target<br>Kinerja<br>Capaian<br>Program<br>(Renstra<br>Perangkat<br>Daerah)<br>Tahun<br>2021 | Realisasi<br>Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan s/d<br>tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan Tahun lalu |                                                             |                             | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja<br>Perangkat<br>Daerah<br>tahun 2021 | Perkiraan Realisasi<br>Target Renstra<br>Daerah s/d tahun |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|         |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                                               | Target<br>Renja<br>Perangka<br>t Daerah<br>tahun<br>2020        | Realisasi<br>Renja<br>Perangka<br>t Daerah<br>tahun<br>2020 | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                                     |                                                           |
| 1       | 2                                                                           | 3                                                              | 4                                                                                            | 5                                                                                             | 6                                                               | 7                                                           | 8                           | 9                                                                                   | 10                                                        |
| 7.01.01 | <b>Program<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan</b>                        | Nilai SAKIP Perangkat<br>Daerah                                | 81%                                                                                          | 81%                                                                                           | NA                                                              | NA                                                          |                             | 78,93                                                                               | 78,30                                                     |

|                     | <b>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                                                    |                                                                           |                       |                   |               |               |      |               |            |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|------|---------------|------------|--|
| <b>7.01.01.2.01</b> | <b>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Perangkat Daerah</b> | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan dan Evaluasi<br>Kinerja Yang dapat tersusun | <b>13<br/>Dokumen</b> | <b>13 dokumen</b> | 13<br>Dokumen | 13<br>Dokumen | 100% | 13<br>Dokumen | 9 Dokumen  |  |
| 7.01.01.2.01.0<br>1 | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                            | Jumlah dokumen evaluasi<br>kinerja PD yang dapat<br>tersusun              | 7<br>Dokumen          | 7 dokumen         | 7<br>Dokumen  | 7<br>Dokumen  | 100% | 7 Dokumen     | 5 Dokumen  |  |
| 7.01.01.2.01.0<br>7 | Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                | Jumlah dokumen evaluasi<br>kinerja yang dapat tersusun                    | 6<br>Dokumen          | 6 dokumen         | 6<br>Dokumen  | 6<br>Dokumen  | 100% | 6 Dokumen     | 4 Dokumen  |  |
| <b>7.01.01.2.02</b> | <b>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat Daerah</b>                               | Persentase Realisasi<br>Anggaran Perangkat Daerah                         | 85%                   | 86%               | 85%           | 84%           | 98%  | 90%           | 52%        |  |
| 7.01.01.2.02.0<br>1 | Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                | Jumlah dokumen<br>pemenuhan gaji dan<br>tunjangan                         | 28 dokumen            | n/a               | 14<br>Dokumen | 14<br>Dokumen | 100% | 28<br>Dokumen | 20 Dokumen |  |
| 7.01.01.2.02.0<br>2 | Penyediaan<br>Administrasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>ASN                              | Jumlah laporan keuangan<br>bulanan dan tahunan                            | 30 laporan            | 30 Laporan        | 30<br>Laporan | 30<br>Laporan | 100% | 30 Laporan    | 20 Laporan |  |

|                 |                                                                  |                                                                                        |          |          |          |          |      |          |         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|---------|
| 7.01.01.2.05    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | <b>Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi</b>             | 31 stel  | 31 Stel  | 31 Stel  | 31 Stel  | 100% | 31 Stel  | 31 Stel |
| 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi                    | 31 stel  | 31 Stel  | 31 Stel  | 31 Stel  | 100% | 31 Stel  | 31 Stel |
| 7.01.01.2.06    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | <b>Persentase penyediaan administrasi umum sesuai kebutuhan</b>                        | 90%      | 100%     | 90%      | 90%      | 100% | 90%      | 75%     |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan           | 1 paket  | 1 paket  | 1 Paket  | 1 Paket  | 100% | 1 Paket  | ¾ Paket |
| 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll. | 1 paket  | 1 paket  | 1 Paket  | 1 Paket  | 100% | 1 Paket  | 1 Paket |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor                                                 | 12 bulan | 12 bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 9 Bulan |

|                     |                                                             |                                                                                                 |                     |              |          |          |      |          |           |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|------|----------|-----------|--|
| 7.01.01.2.06.0<br>5 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   | Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi | 1 paket             | 1 paket      | 1 Paket  | 1 Paket  | 100% | 1 Paket  | 3/4 Paket |  |
| 7.01.01.2.06.0<br>6 | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan    | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                      | 377<br>Bahan bacaan | n/a          | NA       | NA       | NA   | NA       | NA        |  |
| 7.01.01.2.06.0<br>7 | Penyediaan Bahan/Material                                   | Jumlah jenis ATK yang disediakan : Kertas, Tinta, Balpoint, Map dll                             | 1 Paket             | 12 bulan     | 1 Paket  | 1 Paket  | 100% | 1 Paket  | ¾ Paket   |  |
| 7.01.01.2.06.0<br>9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        | Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas                                                   | 12 bulan            | 12 bulan     | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 9 Bulan   |  |
| <b>7.01.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b>         | <b>90%</b>          | <b>100 %</b> | 100%     | 100%     | 100% | 100%     | 75%       |  |
| 7.01.01.2.08.0<br>2 | Penyediaan Jasa Komunikasi,                                 | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber                                                 | 60 bulan            | 12 bulan     | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 9 Bulan   |  |

|                     |                                                                                                                  |                                                                 |            |              |          |          |      |          |          |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|----------|------|----------|----------|--|
|                     | Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                      | daya air dan listrik                                            |            |              |          |          |      |          |          |  |
| 7.01.01.2.08.0<br>4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan             | 2 orang    | 2 orang      | 2 Orang  | 2 Orang  | 100% | 2 Orang  | 1,5      |  |
| <b>7.01.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>Percentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>        | <b>90%</b> | <b>100 %</b> | 89%      | 89%      | 100% | 90%      | 75%      |  |
| 7.01.01.2.09.0<br>2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun          | 2 unit     | 2 unit       | 2 unit   | 2 Unit   | 100% | 2 Unit   | 2 Unit   |  |
| 7.01.01.2.09.0<br>9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik | 3 unit     | 3 unit       | 3 Gedung | 3 Gedung | 100% | 3 Gedung | 3 Gedung |  |

|                     |                                                                                    |                                                                                             |                    |                    |         |         |      |              |         |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|------|--------------|---------|--|
| 7.01.01.2.09.1<br>0 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik                                 | 1 paket            | 1 paket            | 1 Paket | 1 Paket | 100% | 1 Paket      | ¾ Paket |  |
| 7.01.02             | <b>Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal</b>                                   | <b>IKM Kecamatan</b>                                                                        | <b>81%</b>         | N/a                | NA      | NA      | NA   |              |         |  |
| 7.01.02.2.04 .01    | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>                   | <b>Percentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>                         | <b>85%</b>         | <b>81%</b>         |         |         |      |              |         |  |
| 7.01.02.2.04.02     | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>               | <b>Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b> | <b>310 Dokumen</b> | <b>310 Dokumen</b> |         |         |      |              |         |  |
| 7.01.03             |                                                                                    | Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan                          | 10 Pelayanan       | 10 Dokumen         |         |         |      | 15 Pelayanan | 0       |  |

|                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |         |         |      |               |               |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|------|---------------|---------------|--|
|                 |                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan                                                                                                                                 | 310 Dokumen          | 310 Dokumen          |         |         |      | 385 Pelayanan | 402 Pelayanan |  |
|                 | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                                                                                                                                    | <b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>                                                                                                                                    | <b>81%</b>           | <b>81%</b>           |         |         |      | 81%           |               |  |
| 7.01.06.2.01    | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa bidang Pemerintahan, Pembangunan,Ketentraman , Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b> | <b>Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa bidang Pemerintahan, Pembangunan,Ketentraman , Ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b> | <b>72 fasilitasi</b> | <b>13 fasilitasi</b> | 19 Desa | 19 desa | 100% | 52 Fasilitasi |               |  |
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                               | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                  | 12 fasilitasi        | 3 fasilitasi         | 19 Desa | 19 Desa | 100% | 10 Fasilitasi | 7 Fasilitasi  |  |

|                     |                                                                                                     |                                                                                                      |               |              |                |                |      |               |               |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|--|
|                     | Pemerintahan<br>Desa                                                                                |                                                                                                      |               |              |                |                |      |               |               |  |
| 7.01.06.2.01.<br>09 | Fasilitasi<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah<br>dengan<br>Pembangunan<br>Desa | Jumlah Fasilitasi<br>Sinkronisasi<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>dengan Pembangunan<br>Desa | 24Fasilitasi  | 4 fasilitasi | 19 Desa        | 19 desa        | 100% | 8 Fasilitasi  | 5 Fasilitasi  |  |
| 7.01.06.2.01.<br>11 | Fasilitasi<br>Penyelenggara<br>an<br>Ketenteraman<br>dan Ketertiban<br>Umum                         | Jumlah Fasilitasi<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                          | 12 Fasilitasi | 3 fasilitasi | 16<br>Kegiatan | 16<br>Kegiatan | 100% | 10 fasilitasi | 7 fasilitasi  |  |
| 7.01.06.2.01.<br>12 | Fasilitasi<br>Pelaksanaan<br>Tugas, Fungsi,<br>dan<br>Kewajiban<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan        | Jumlah Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas,<br>Fungsi, dan Kewajiban<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan        | 24 Fasilitasi | 3 fasilitasi | 15<br>Kegiatan | 15<br>Kegiatan | 100% | 24 fasilitasi | 19 fasilitasi |  |

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta memperoleh upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tujuan dan fungsinya Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan catatan indikator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Ngoro

| No. | TUJUAN                                 | SASARAN                                            | INDIKATOR TUJUAN SASARAN  |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |                                                    | Nilai IKM Kecamatan       |
|     |                                        | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah | Nilai Reformasi Birokrasi |
|     |                                        | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal          | Nilai IKM Kecamatan       |

Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (Tabel 2.4) sebagaimana berikut dibawah ini

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)  
 Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngoro  
 Kabupaten Mojokerto

| NO | Indikator                                                          | SPM/<br>Standart<br>Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |                        |                      |                        | Realisasi Capaian      |                        | Proyeksi             |                        |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|    |                                                                    |                              |     | Tahun<br>2020                   | Tahun<br>2021<br>(n-1) | Tahun<br>2022<br>(n) | Tahun<br>2023<br>(n+1) | Tahun<br>2020<br>(n-2) | Tahun<br>2021<br>(n-1) | Tahun<br>2022<br>(n) | Tahun<br>2023<br>(n+1) |
| 1  | 2                                                                  | 3                            | 4   | 5                               | 6                      | 7                    | 8                      | 9                      | 10                     | 11                   | 12                     |
| 1  | Nilai SAKIP Perangkat<br>Daerah                                    |                              |     | NA                              | 78,93                  | 79,73                | 80,53                  | NA                     | 78,30                  | 79,73                | 80,53                  |
| 2  | Presentase Pelayanan<br>yang terlayani sesuai<br>Standar Pelayanan |                              |     | 79%                             | 80%                    | 81%                  | 82%                    | 79%                    |                        | 81%                  | 82%                    |
| 3  | Persentase Hasil<br>Koordinasi yang<br>ditindaklanjuti             |                              |     | 79%                             | 80%                    | 81%                  | 82%                    | 79%                    |                        | 81%                  | 82%                    |

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Ngoro diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

#### **a. Kondisi Internal**

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi Penetapan, Penyelenggaraan kewenagan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Ngoro

##### **- Faktor Kekuatan Organisasi**

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Ngoro bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor Kecamatan Ngoro yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang mencukupi memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Kantor Kecamatan Ngoro;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

##### **- Faktor Kelemahan Organisasi**

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Ngoro namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian, peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pekerja struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi intansi pemerintah.
6. Infrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Ngoro yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Ngoro untuk dapat meningkatkan

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensikan kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergi program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan/Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPP Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut

**Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Mojokerto**

**Perangkat Daerah : Kecamatan Ngoro**

| NO | Rancangan Awal RKPD                                                     |                   |                                                                              |                   |                          | Hasil Analisis Kebutuhan                                                |                   |                                                                              |                   |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|    | Program/Kegiatan                                                        | Lokasi            | Indikator Kerja                                                              | Target Capaian    | Pagu Indikator (Rp. 000) | Program/Kegiatan                                                        | Lokasi            | Indikator Kerja                                                              | Target Capaian    |  |
| 1  | 2                                                                       | 3                 | 4                                                                            | 5                 | 6                        | 7                                                                       | 8                 | 9                                                                            | 10                |  |
|    | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>Kec. Ngoro</b> | <b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>                                          | <b>79,73</b>      | 3.816.143.773            | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>      | <b>Kec. Ngoro</b> | <b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>                                          | <b>79,73</b>      |  |
|    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Kec. Ngoro</b> | <b>Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dapat tersusun</b>   | <b>13 Dokumen</b> | 10.000.000               | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>Kec. Ngoro</b> | <b>Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dapat tersusun</b>   | <b>13 Dokumen</b> |  |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | <b>Kec. Ngoro</b> | Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku | 7 dokumen         | 5.000.000                | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | <b>Kec. Ngoro</b> | Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku | 7 dokumen         |  |
|    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | <b>Kec. Ngoro</b> | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun                          | 6 dokumen         | 5.000.000                | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | <b>Kec. Ngoro</b> | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun                          | 6 dokumen         |  |

|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        |            | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah                            | 90%        | 3.402.143.773 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        |            | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah                            | 90%        |
|--|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Kec. Ngoro | Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          | 28 Laporan | 3.397.143.773 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Kec. Ngoro | Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          | 28 Laporan |
|  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | Kec. Ngoro | Jumlah laporan Keuangan bulanan                                           | 30 Laporan | 5.000.000     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | Kec. Ngoro | Jumlah laporan Keuangan bulanan                                           | 30 Laporan |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Kec. Ngoro | IP ASN Perangkat Daerah                                                   | 81         | 30.000.000    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                     | Kec. Ngoro | IP ASN Perangkat Daerah                                                   | 81         |
|  | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Kec. Ngoro | Jumlah Bintek Peningkatan ASN yang dilaksanakan                           | 2 Bintek   | 10.000.000    | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Kec. Ngoro | Jumlah Bintek Peningkatan ASN yang dilaksanakan                           | 2 Bintek   |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Kec. Ngoro | Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya                 | 30 stel    | 20.000.000    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya        | Kec. Ngoro | Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya                 | 30 stel    |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Kec. Ngoro | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan | 90%        | 185.000.000   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | Kec. Ngoro | Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan | 90%        |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi                                 | Kec. Ngoro | Jumlah jenis komponen instalasi                                           | 1 paket    | 10.000.000    | Penyediaan Komponen Instalasi                                 | Kec. Ngoro | Persentase realisasi anggaran Perangkat                                   | 1 paket    |

|  | Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                          |                       | listrik/penerangan<br>bangunan kantor                                                                                                  |                     |            | Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                                 |                       | <b>Daerah</b>                                                                                                                          |                     |
|--|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor             | <b>Kec.<br/>Ngoro</b> | Jumlah jenis peralatan<br>dan perlengkapan<br>kantor yang<br>disediakan                                                                | 1 paket             | 50.000.000 | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                    | <b>Kec.<br/>Ngoro</b> | Jumlah jenis peralatan<br>dan perlengkapan<br>kantor yang disediakan                                                                   | 1 paket             |
|  | Penyediaan bahan<br>Logistik Kantor                            | <b>Kec.<br/>Ngoro</b> | Jumlah waktu<br>penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                                                    | 12 Bulan            | 20.000.000 | Penyediaan bahan<br>Logistik Kantor                                   | <b>Kec.<br/>Ngoro</b> | Jumlah waktu<br>penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                                                                    | 12 Bulan            |
|  | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                | <b>Kec.<br/>Ngoro</b> | Jumlah jenis barang<br>cetakan dan<br>penggandaan yang<br>disediakan : kertas<br>kop, amplop kop,<br>lembar disposisi dan<br>foto copy | 1 paket             | 20.000.000 | Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                       | <b>Kec.<br/>Ngoro</b> | Jumlah jenis barang<br>cetakan dan<br>penggandaan yang<br>disediakan : kertas<br>kop, amplop kop,<br>lembar disposisi dan<br>foto copy | 1 paket             |
|  | Penyediaan bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan | <b>Kec.<br/>Ngoro</b> | Jumlah jenis Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan<br>yang disediakan                                                    | 377 Bahan<br>Bacaan | 5.000.000  | Penyediaan bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan | <b>Kec.<br/>Ngoro</b> | Jumlah jenis Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan<br>yang disediakan                                                    | 377 Bahan<br>Bacaan |
|  | Penyediaan<br>Bahan/Material                                   | <b>Kec.<br/>Ngoro</b> | Jumlah jenis ATK<br>yang disediakan:<br>kertas, tinta, ballpoint,<br>map dll                                                           | 1 paket             | 45.000.000 | Penyediaan<br>Bahan/Material                                          | <b>Kec.<br/>Ngoro</b> | Jumlah jenis ATK yang<br>disediakan: kertas,<br>tinta, ballpoint, map dll                                                              | 1 paket             |
|  | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD     | <b>Kec.<br/>Ngoro</b> | Jumlah waktu<br>pemenuhan biaya<br>Rapat Koordinasi dan                                                                                | 12 Bulan            | 35.000.000 | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD            | <b>Kec.<br/>Ngoro</b> | Jumlah waktu<br>pemenuhan biaya<br>Rapat Koordinasi dan                                                                                | 12 Bulan            |

|  |                                                                              |                   |                                                                                         |              |                    |                                                                              |                   |                                                                                         |              |
|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |                                                                              |                   | Konsultasi SKPD                                                                         |              |                    |                                                                              |                   | Konsultasi SKPD                                                                         |              |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Kec. Ngoro</b> | <b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b> | <b>100 %</b> | <b>72.000.000</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Kec. Ngoro</b> | <b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan</b> | <b>100 %</b> |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | <b>Kec. Ngoro</b> | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                    | 12 bulan     | 40.000.000         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | <b>Kec. Ngoro</b> | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                    | 12 bulan     |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | <b>Kec. Ngoro</b> | Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan                              | 3 Orang      | 32.000.000         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | <b>Kec. Ngoro</b> | Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan                              | 3 Orang      |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Kec. Ngoro</b> | <b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>                                | <b>90 %</b>  | <b>117.000.000</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Kec. Ngoro</b> | <b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>                                | <b>90 %</b>  |
|  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas                    | <b>Kec. Ngoro</b> | Jumlah pengadaan kendaraan dinasoperasional pendukung tugas sesuai kebutuhan            | 1 Kendaraan  | 24.000.000         | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas                    | <b>Kec. Ngoro</b> | Jumlah pengadaan kendaraan dinasoperasional pendukung tugas sesuai kebutuhan            | 1 Kendaraan  |

|  |                                                                                                                  |            |                                                                                                                                              |                       |                   |                                                                                                                  |            |                                                                                                                                              |                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Kec. Ngoro | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan | 3 kendaraan           | 38.000.000        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Kec. Ngoro | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan | 3 kendaraan           |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Kec. Ngoro | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik                                                                              | 3 gedung              | 40.000.000        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Kec. Ngoro | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik                                                                              | 3 gedung              |
|  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Kec. Ngoro | Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor                                                                             | 1 paket               | 15.000.000        | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Kec. Ngoro | Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor                                                                             | 1 paket               |
|  | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>                                                 | Kec. Ngoro | <b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>                                                                          | <b>81%</b>            | <b>35.000.000</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>                                                 | Kec. Ngoro | <b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>                                                                          | <b>81%</b>            |
|  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                             | Kec. Ngoro | <b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>                                                            | <b>1000 pelayanan</b> | <b>35.000.000</b> | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                             | Kec. Ngoro | <b>Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>                                                            | <b>1000 pelayanan</b> |

|  |                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                            |                      |                    |                                                                                          |            |                                                                                                                                                                                            |                      |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha        | Kec. Ngoro | Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan                                                                                                                         | 10 pelayanan         | 5.000.000          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan     | Kec. Ngoro | Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan                                                                                                                         | 10 pelayanan         |  |
|  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                         | Kec. Ngoro | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan                                                                                                                     | 990 pelayanan        | 30.000.000         |                                                                                          | Kec. Ngoro | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan                                                                                                                     | 990 pelayanan        |  |
|  | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                | Kec. Ngoro | <b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>                                                                                                                                    | <b>81%</b>           | <b>340.000.000</b> | <b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                                | Kec. Ngoro | <b>Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti</b>                                                                                                                                    | <b>81%</b>           |  |
|  | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | Kec. Ngoro | <b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b> | <b>52 fasilitasi</b> | <b>340.000.000</b> | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> | Kec. Ngoro | <b>Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat</b> | <b>52 fasilitasi</b> |  |
|  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan                                                | Kec. Ngoro | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata                                                                                                                                                        | 10 Fasilitasi        | 60.000.000         | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan                                                | Kec. Ngoro | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata                                                                                                                                                        | 10 Fasilitasi        |  |

|               |                                                                                |            |                                                                                       |               |               |                                                                                |            |                                                                                       |               |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|               | Desa                                                                           |            | Pemerintahan Desa                                                                     |               |               | Desa                                                                           |            | Pemerintahan Desa                                                                     |               |  |
|               | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Ngoro | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 8 Fasilitasi  | 60.000.000    | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Ngoro | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 8 Fasilitasi  |  |
|               | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Kec. Ngoro | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | 10 Fasilitasi | 80.000.000    | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Kec. Ngoro | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | 12 Fasilitasi |  |
|               | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Kec. Ngoro | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | 24 Fasilitasi | 140.000.000   | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Kec. Ngoro | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | 24 Fasilitasi |  |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                                |            |                                                                                       |               | 4.191.143.773 | <b>JUMLAH</b>                                                                  |            |                                                                                       |               |  |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan sehari-hari berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi Kecamatan Ngoro. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada di Kecamatan Ngoro melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan. Hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bersifat kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Ngoro secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Berdasarkan penelaahan usulan program dan kegiatan, terdapat usulan dari pemangku kepentingan. Sehingga rincian pada tabel 2.6 (T-C 32) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 (Dalam Permendagri No 86/2017 Tabel T-C 32)  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat daerah : Kecamatan Ngoro

| No | Program/Kegiatan                                                                                                                                                           | Lokasi                                    | Indikator Kinerja | Besaran/Volume     | Catatan                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b><br>- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - | Masjid Roudlotul Mu'minin, Desa Purwojati |                   | 1 Ekor sapi Kurban | Diselesaikan pada hari Rabu |

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka sebagian besar program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Ngoro ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayanan masyarakat (IKM) Kecamatan.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Adapun tujuan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 – 2026 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan dan Inovatif.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jangka waktu yang terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah;
2. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto pada 2022 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1.**

**Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran**

| No. | TUJUAN                                 | SASARAN                                            | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN                 | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN |      |      |      |      |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                        |                                                    |                                            | 2022                                       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.  | Meningkatnya kualitas pelayanan public |                                                    | IKM Kecamatan                              | 82                                         | 83   | 84   | 85   | 86   |
|     |                                        | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 61                                         | 63   | 64   | 65   | 67   |
|     |                                        | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal          | IKM Kecamatan                              | 82                                         | 83   | 84   | 85   | 86   |

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Ngoro Tahun 2024 mengacu pada Tujuan Kecamatan Ngoro yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngoro untuk 5 tahun mendatang yaitu **Meningkatkan kualitas pelayanan publik**. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada j

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  6. Pemerintahan Bahan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022

dan Perkiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngoro

| Kod e                                                                   | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)   | Rencana Tahun 2022 |                        |                                |             |                 | Prakiraan Maju Rencana |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
|                                                                         |                                                                              |                                                            | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1                                                                       | 2                                                                            | 3                                                          | 4                  | 5                      | 6                              | 7           | 8               | 9                      | 10                             |
| 1                                                                       | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                               | Kec. Ngoro         | 79,73                  | 4.191.143.773                  | APBD Kab    |                 | 80,53                  | 4.488                          |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                                                              |                                                            |                    |                        |                                |             |                 |                        |                                |
|                                                                         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Jumlah dokumen yang tersusun                               | Kec. Ngoro         | 7 dokumen              | 5.000.000                      | APBD Kab    |                 | 7 dokumen              | 10.000.000                     |
|                                                                         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            | Jumlah dokumen yang tersusun                               | Kec. Ngoro         | 6 dokumen              | 5.000.000                      | APBD Kab    |                 | 6 dokumen              | 10.000.000                     |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                                                              |                                                            |                    |                        |                                |             |                 |                        |                                |
|                                                                         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            | Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN           | Kec. Ngoro         | 28 laporan             | 3.397.143.773                  | APBD Kab    |                 | 28 laporan             | 3.568.000.000                  |
|                                                                         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                | Jumlah laporan Keuangan bulanan                            | Kec. Ngoro         | 30 laporan             | 5.000.0000                     | APBD Kab    |                 | 30 laporan             | 10.000.000.000                 |
| <b>Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah</b>                          |                                                                              |                                                            |                    |                        |                                |             |                 |                        |                                |
|                                                                         | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi                | Jumlah Bintek peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan | Kec. Ngoro         | 2 Bintek               | 10.000.000                     | APBD Kab    |                 | 2 Bintek               | 15.000.000                     |

|  |                                                        |                                                           |            |         |            |          |  |         |      |
|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------|--|---------|------|
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya | Kec. Ngoro | 30 stel | 20.000.000 | APBD Kab |  | 30 stel | 25.0 |
|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|------------|----------|--|---------|------|

#### Administrasi Umum Perangkat Daerah

|  |                                                                  |                                                                                                                     |            |                  |            |          |  |                  |      |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------|----------|--|------------------|------|
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                                  | Kec. Ngoro | 1paket           | 10.000.000 | APBD Kab |  | 1paket           | 10.0 |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                                      | Kec. Ngoro | 1paket           | 50.000.000 | APBD Kab |  | 1paket           | 78.0 |
|  | Penyediaan bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                       | Kec. Ngoro | 12 bulan         | 20.000.000 | APBD Kab |  | 12 bulan         | 20.0 |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah jenis barang cetakan dan pengandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy | Kec. Ngoro | 1paket           | 20.000.000 | APBD Kab |  | 1 paket          | 20.0 |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                                          | Kec. Ngoro | 377 bahan bacaan | 5.000.000  | APBD Kab |  | 377 bahan bacaan | 5.0  |
|  | Penyediaan Bahan/Material                                        | Jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map, dll                                                      | Kec. Ngoro | 1 Paket          | 45.000.000 | APBD Kab |  | 1 Paket          | 45.0 |
|  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                   | Kec. Ngoro | 12 bulan         | 35.000.000 | APBD Kab |  | 12 bulan         | 35.0 |

#### Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

|  |                                                         |                                                                               |            |          |            |          |  |          |      |
|--|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|--|----------|------|
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan | Kec. Ngoro | 12 bulan | 40.000.000 | APBD Kab |  | 12 bulan | 50.0 |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan selama 12 bulan    | Kec. Ngoro | 2 THL    | 32.000.000 | APBD Kab |  | 2 THL    | 32.0 |

#### Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

|  |                                                                                                                  |                                                                                                                                          |            |             |            |          |  |             |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|--|-------------|------|
|  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas                                                        | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional pendukung tugas sesuai kebutuhan                                                            | Kec. Ngoro | 1 kendaraan | 24.000.000 | APBD Kab |  | 2 kendaraan | 50.0 |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya selama 12 bulan | Kec. Ngoro | 3 kendaraan | 38.000.000 | APBD Kab |  | 4 kendaraan | 40.0 |
|  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi                                                                                       | Jumlah gedung kantor yang                                                                                                                | Kec. Ngoro | 3 gedung    | 40.000.000 | APBD Kab |  | 3 gedung    | 45.0 |

|                                                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                   |               |                      |                 |  |                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------|--|----------------|--------------------|
|                                                                                          | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                  | terpelihara dan berfungsi dengan baik                                                 |                   |               |                      |                 |  |                |                    |
|                                                                                          | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor                      | Kec. Ngoro        | 1 paket       | 15.000.000           | APBD Kab        |  | 1paket         | 15.0               |
| <b>II</b>                                                                                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                    | <b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>                   | <b>Kec. Ngoro</b> | <b>81%</b>    | <b>35.000.000</b>    | <b>APBD Kab</b> |  | <b>82%</b>     | <b>45.0</b>        |
| <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                     |                                                                                     |                                                                                       |                   |               |                      |                 |  |                |                    |
|                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   | Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan                    | Kec. Ngoro        | 10 Pelayanan  | 5.00.000             | APBD Kab        |  | 10 Pelayanan   | 10.000.000         |
|                                                                                          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                    | Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan                | Kec. Ngoro        | 990 Pelayanan | 30.000.000           | APBD Kab        |  | 1100 Pelayanan | 35.000.000         |
| <b>III</b>                                                                               | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                           | <b>Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti</b>                   | <b>Kec. Ngoro</b> | <b>81%</b>    | <b>340.000.000</b>   | <b>APBD Kab</b> |  | <b>82%</b>     | <b>360.000.000</b> |
| <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> |                                                                                     |                                                                                       |                   |               |                      |                 |  |                |                    |
|                                                                                          | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                      | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Kec. Ngoro        | 10 Fasilitasi | 60.000.000           | APBD Kab        |  | 10 Fasilitasi  | 65.000.000         |
|                                                                                          | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa      | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Kec. Ngoro        | 8 Fasilitasi  | 60.000.000           | APBD Kab        |  | 8 Fasilitasi   | 65.000.000         |
|                                                                                          | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                         | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Kec. Ngoro        | 10 Fasilitasi | 80.000.000           | APBD Kab        |  | 10 Fasilitasi  | 80.000.000         |
|                                                                                          | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan          | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | Kec. Ngoro        | 24Fasilitasi  | 140.000 000          | APBD Kab        |  | 24 Fasilitasi  | 150.100.000        |
| <b>JUMLAH</b>                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |                   |               | <b>4.191.143.773</b> | <b>JUMLAH</b>   |  |                | <b>4.488</b>       |

**TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

**Indikator Tujuan : IKM Kecamatan**

**Target Indikator Tujuan : 82**

**SASARAN : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah**

**Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**

**Target Indikator Sasaran : 61**

**SASARAN : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal**

**Indikator Sasaran : IKM Kecamatan**

**Target Indikator Sasaran : 82**

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

**Target Indikator Program : 79,73**

**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan

**Target Indikator Program : 81 %**

**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti

**Target Indikator Program: 81 %**

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang dapat tersusun sesuai ketentuan.

Target indikator Kegiatan : 13 Dokumen

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah

Target Indikator Kegiatan : 90%

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

IP ASN Perangkat Daerah

Target Indikator Kegiatan :81

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan

Target Indikator Kegiatan : 90%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan

Target Indikator Kegiatan : 100%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik

Target Indikator Kegiatan : 90%

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan

Target Indikator Kegiatan : 1000 Pelayanan

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat

Target Indikator Kegiatan : 52 Fasilitasi

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

## **PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan sejumlah eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan sasaran, kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rencana Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan mengandalkan rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian

kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto tahun 2022, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1**

**MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022**  
**KECAMATAN NGORO**  
**KABUPATEN MOJOKERTO**

KODE SKPD : 4.01.21 / 7.01.0.00.0.00.11

NAMA SKPD : KECAMATAN NGORO

| N<br>O  | URUSAN/BIDANG<br>URUSAN<br>PEMDA/PROGRAM/KEG<br>IATAN/SUB KEGIATAN    | PRIORI<br>TAS<br>DAERA<br>H | SASARAN<br>DAERAH | LOKASI        | INDIKATOR KINERJA                  |            |                                                                                 |                   |                       |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------|
|         |                                                                       |                             |                   |               | HASIL PROGRAM                      |            | HASIL KEGIATAN                                                                  |                   | KELUARAN SUB KEGIATAN |        |
|         |                                                                       |                             |                   |               | TOLOK UKUR                         | TARGE<br>T | TOLOK UKUR                                                                      | TARGET            | TOLOK UKUR            | TARGET |
| 1       | 2                                                                     | 3                           | 4                 | 5             | 6                                  | 7          | 8                                                                               | 9                 | 10                    | 11     |
| I       | UNSUR KEWILAYAHAN                                                     |                             |                   |               |                                    |            |                                                                                 |                   |                       |        |
| I.<br>1 | KECAMATAN                                                             |                             |                   |               |                                    |            |                                                                                 |                   |                       |        |
| 1       | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA     |                             |                   | KEC.<br>NGORO | Nilai SAKIP<br>Perangkat<br>Daerah | 79,73      |                                                                                 |                   |                       |        |
|         | Perencanaan, Penganggaran<br>dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                             |                   |               |                                    |            | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan dan<br>Evaluasi Kinerja<br>yang dapat<br>tersusun | 13<br>Dokume<br>n |                       |        |

|  |                                                                |  |  |            |  |  |                                                       |                                                                              |            |
|--|----------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              |  |  | Kec. Ngoro |  |  |                                                       | Jumlah Dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku | 7 Dokumen  |
|  | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            |  |  | Kec. Ngoro |  |  |                                                       | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun                        | 6 Dokumen  |
|  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                  |  |  |            |  |  | <b>Persentase realisasi anggaran perangkat daerah</b> | <b>90%</b>                                                                   |            |
|  | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                            |  |  | Kec. Ngoro |  |  |                                                       | Jumlah dokumen penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | 28 Dokumen |
|  | - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                |  |  | Kec. Ngoro |  |  |                                                       | Jumlah laporan keuangan bulanan                                              | 30 Laporan |
|  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>               |  |  |            |  |  | <b>IP ASN Perangkat daerah</b>                        | <b>81</b>                                                                    |            |
|  | -Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi |  |  |            |  |  |                                                       | Jumlah Bintek peningkatan kompetensi ASN yang dilaksanakan                   | 2 Bintek   |
|  | -Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Lengkapnya            |  |  | Kec. Ngoro |  |  |                                                       | Jumlah penyediaan pakaian dinas                                              | 30 stel    |

|  |                                                                    |  |  |            |  |  |  |                                                                                                                      |                  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                                                                    |  |  |            |  |  |  | PNS serta perlengkapannya                                                                                            |                  |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          |  |  |            |  |  |  | Persentase penyediaan administrasi umum PD sesuai kebutuhan                                                          | <b>90%</b>       |
|  | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  | Kec. Ngoro |  |  |  | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                                   | 1 paket          |
|  | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  | Kec. Ngoro |  |  |  | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                                       | 1 paket          |
|  | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |  | Kec. Ngoro |  |  |  | Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                        | 12 Bulan         |
|  | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |  |  | Kec. Ngoro |  |  |  | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy | 1 paket          |
|  | - Penyediaan Bahan Bacaan an Peraturan Perundang- undangan         |  |  | Kec. Ngoro |  |  |  | Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan                                                                              | 377 bahan bacaan |

|  |                                                                            |  |  |                                   |  |  |                                                                                  |                                                                      |             |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
|  |                                                                            |  |  |                                   |  |  |                                                                                  | Perundang-undangan yang disediakan                                   |             |
|  | - Penyediaan Bahan/Material                                                |  |  | Kec. Ngoro                        |  |  |                                                                                  | Jumlah Jenis ATK yang Disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll  | 1 paket     |
|  | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     |  |  | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Desa |  |  |                                                                                  | Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | 12 Bulan    |
|  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                |  |  |                                   |  |  | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan | <b>100%</b>                                                          |             |
|  | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                  |  |  | Kec. Ngoro                        |  |  |                                                                                  | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan    |
|  | ; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                    |  |  | Kec. Ngoro                        |  |  |                                                                                  | Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan           | 2 THL       |
|  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  |  |                                   |  |  | Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik                                | <b>90%</b>                                                           |             |
|  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas                  |  |  | Kec. Ngoro                        |  |  |                                                                                  | Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional                         | 1 kendaraan |

|          |                                                                                                                  |  |  |            |                                                                     |            |                                                                            |                                                                                                                                              |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |                                                                                                                  |  |  |            |                                                                     |            |                                                                            | pendukung tugas sesuai kebutuhan                                                                                                             |             |
|          | - Penyediaan Jas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan |  |  | Kec. Ngoro |                                                                     |            |                                                                            | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan | 3 Kendaraan |
|          | - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                 |  |  | Kec. Ngoro |                                                                     |            |                                                                            | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik                                                                              | 3 Gedung    |
|          | - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya                           |  |  | Kec. Ngoro |                                                                     |            |                                                                            | Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor                                                                             | 1 Paket     |
| <b>2</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                 |  |  |            | <b>Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan</b> | <b>85%</b> |                                                                            |                                                                                                                                              |             |
|          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                    |  |  |            |                                                                     |            | Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | <b>1000 Pelayanan</b>                                                                                                                        |             |

|          |                                                                                     |  |  |                                   |                                                  |     |                                                                                                                                                                                     |                                                                        |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |  |  | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Desa |                                                  |     |                                                                                                                                                                                     | Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan     | 10 Pelayan  |
|          | - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan                 |  |  | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Desa |                                                  |     |                                                                                                                                                                                     | Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 990 Pelayan |
| <b>3</b> | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                           |  |  |                                   | Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti | 81% |                                                                                                                                                                                     |                                                                        |             |
|          | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   |  |  |                                   |                                                  |     | Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat | 72 Fasilitasi                                                          |             |
|          | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                      |  |  | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Desa |                                                  |     |                                                                                                                                                                                     | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                  | 10 Fasili   |

|  |                                                                                |  |  |                                   |  |  |  |                                                                                       |            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |  |  | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Desa |  |  |  | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 8 Fasilita |
|  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    |  |  | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Desa |  |  |  | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | 10 Fasili  |
|  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     |  |  | Kab. Mojokerto, Ngoro, Semua Desa |  |  |  | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan     | 24 Fasili  |

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngoro Tahun 2022 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperbaiki optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ngoro, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antara instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antara pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Ngoro, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

### **1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2019 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja

2022 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendari Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Ngoro Tahun 2022 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dan upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedongkan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya Rencana RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto Renstra Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto.

### **1.3. Rencana Tindak Lanjut**

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Ngoro diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kita tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang berbangun sangat kami harapkan.

Mojokerto, September 2022

**Plt. Camat Ngoro**

Drs. MUJIB, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196508091993121001



**RENCANA KERJA  
KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
KECAMATAN NGORO  
TAHUN 2021**